# BUPATI LIMA PULUH KOTA
## PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**
**NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 12);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lima Puluh Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal-usul Nagari diwilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
7. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Dana Desa/Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

## BAB II
## PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi; dan
c. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

**Pasal 4**

(1) Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Nagari dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA per Desa = (0,03*DD) / {(2 * DST) + (1 * DT)}

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2019

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

**Pasal 5**

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

**Pasal 6**

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.

**Pasal 7**

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

**Pasal 8**

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**
**PENYALURAN DANA DESA**
**Pasal 9**

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Nagari mengenai APBNagari.

(4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Wali Nagari.

(5) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap II dari Wali Nagari.

(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output*

menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

(7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Wali Nagari dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## BAB IV
## PENGGUNAAN DANA DESA
### Pasal 10

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari mengenai APBNagari.

### Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat.

### Pasal 12

(1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

## BAB V
## PELAPORAN DANA DESA
### Pasal 13

(1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wali Nagari dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

## BAB VI
## SANKSI
### Pasal 14

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Nagari tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala Kepala Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

**Pasal 15**

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;

b. sisa Dana Desa di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan

a. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Nagari dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD Nagari tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam hal Nagari telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa Anggaran lebih pada Rekening Kas Umum Negara.

**Pasal 16**

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Nagari lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

**BAB VII**
**KETENTUAN PENUTUP**
**Pasal 17**

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 7 Januari 2019

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**IRFENDI ARBI**

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 7 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**WIDYA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 7 JANUARI 2019
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DISETIAP NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | NAMA KECAMATAN/ NAGARI | Alokasi Dasar | Alokasi Afirmasi | Alokasi Formula | Pagu Dana Desa per-Nagari |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) |
| **I** | **Kecamatan Suliki** | **4.034.528.322** | - | **946.074.088** | **4.980.602.837** |
| 1 | KURAI | 672.421.387 | | 218.756.662 | 891.178.049 |
| 2 | SUNGAI RIMBANG | 672.421.387 | | 115.115.070 | 787.536.884 |
| 3 | TANJUANG BUNGO | 672.421.387 | | 167.252.397 | 839.673.784 |
| 4 | SULIKI | 672.421.387 | | 172.078.002 | 844.499.389 |
| 5 | LIMBANANG | 672.421.387 | | 181.963.365 | 854.384.752 |
| 6 | ANDIANG | 672.421.387 | | 90.908.592 | 763.329.979 |
| **II** | **Kecamatan Guguak** | **3.362.106.935** | - | **1.001.527.216** | **4.363.634.151** |
| 1 | GUGUAK VIII KOTO | 672.421.387 | | 240.980.539 | 913.401.926 |
| 2 | VII KOTO TALAGO | 672.421.387 | | 157.842.487 | 830.263.874 |
| 3 | SUNGAI TALANG | 672.421.387 | | 202.156.940 | 874.578.327 |
| 4 | KUBANG | 672.421.387 | | 250.679.098 | 923.100.485 |
| 5 | SIMPANG SUGIRAN | 672.421.387 | | 149.868.152 | 822.289.539 |
| **III** | **Kecamatan Payakumbuh** | **4.706.949.709** | - | **1.464.554.837** | **6.171.504.546** |
| 1 | KOTO BARU SIMALANGGANG | 672.421.387 | | 242.303.219 | 914.724.606 |
| 2 | TAEH BUKIK | 672.421.387 | | 294.825.757 | 967.247.144 |
| 3 | SIMALANGGANG | 672.421.387 | | 189.488.112 | 861.909.499 |
| 4 | SUNGAI BERINGIN | 672.421.387 | | 145.373.772 | 817.795.159 |
| 5 | PIOBANG | 672.421.387 | | 188.306.087 | 860.727.474 |
| 6 | TAEH BARUAH | 672.421.387 | | 282.301.596 | 954.722.983 |
| 7 | KOTO TANGAH SIMALANGGANG | 672.421.387 | | 121.956.294 | 794.377.681 |
| **IV** | **Kecamatan Luak** | **2.689.685.548** | - | **1.095.931.387** | **3.785.616.935** |
| 1 | TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJA | 672.421.387 | | 298.491.026 | 970.912.413 |
| 2 | MUNGO | 672.421.387 | | 327.447.713 | 999.869.100 |
| 3 | SUNGAI KAMUYANG | 672.421.387 | | 318.020.689 | 990.442.076 |
| 4 | ANDALEH | 672.421.387 | | 151.971.959 | 824.393.346 |
| **V** | **Kecamatan Harau** | **7.396.635.257** | - | **2.837.368.614** | **10.234.003.871** |
| 1 | TARAM | 672.421.387 | | 222.840.442 | 895.261.829 |
| 2 | SOLOK BIO BIO | 672.421.387 | | 254.519.155 | 926.940.542 |
| 3 | TARANTANG | 672.421.387 | | 147.719.203 | 820.140.590 |
| 4 | BUKIK LIMBUKU | 672.421.387 | | 142.392.188 | 814.813.575 |
| 5 | HARAU | 672.421.387 | | 300.677.953 | 973.099.340 |
| 6 | BATU BALANG | 672.421.387 | | 284.376.723 | 956.798.110 |
| 7 | SARILAMAK | 672.421.387 | | 763.159.615 | 1.435.581.002 |
| 8 | GURUN | 672.421.387 | | 121.827.554 | 794.248.941 |
| 9 | LUBUAK BATINGKOK | 672.421.387 | | 225.785.907 | 898.207.294 |
| 10 | KOTO TUO | 672.421.387 | | 235.237.992 | 907.659.379 |
| 11 | PILUBANG | 672.421.387 | | 138.831.882 | 811.253.269 |
| **VI** | **Kecamatan Pangkalan Koto Baru** | **4.034.528.322** | **211.289.000** | **2.769.550.715** | **7.015.368.037** |
| 1 | MANGGILANG | 672.421.387 | | 432.827.449 | 1.105.248.836 |
| 2 | TANJUANG BALIK | 672.421.387 | | 369.784.234 | 1.042.205.621 |
| 3 | GUNUANG MALINTANG | 672.421.387 | | 495.866.229 | 1.168.287.616 |
| 4 | PANGKALAN | 672.421.387 | | 726.069.180 | 1.398.490.567 |
| 5 | KOTO ALAM | 672.421.387 | 211.289.000 | 453.232.555 | 1.336.942.942 |
| 6 | TANJUNG PAUH | 672.421.387 | | 291.771.068 | 964.192.455 |
| **VII** | **Kecamatan Kapur IX** | **4.706.949.709** | **211.289.000** | **2.495.952.921** | **7.414.191.630** |
| 1 | MUARO PAITI | 672.421.387 | | 284.344.332 | 956.765.719 |
| 2 | KOTO BANGUN | 672.421.387 | | 291.138.957 | 963.560.344 |
| 3 | LUBUAK ALAI | 672.421.387 | | 260.844.274 | 933.265.661 |
| 4 | KOTO LAMO | 672.421.387 | | 247.250.636 | 919.672.023 |
| 5 | DURIAN TINGGI | 672.421.387 | | 212.961.751 | 885.383.138 |
| 6 | SIALANG | 672.421.387 | | 623.264.083 | 1.295.685.470 |
| 7 | GALUGUA | 672.421.387 | 211.289.000 | 576.148.888 | 1.459.859.275 |
| **VIII** | **Kecamatan Gunuang Omeh** | **2.017.264.161** | - | **1.142.847.563** | **3.160.111.724** |
| 1 | PANDAM GADANG | 672.421.387 | | 500.660.529 | 1.173.081.916 |
| 2 | KOTO TINGGI | 672.421.387 | | 497.744.881 | 1.170.166.268 |
| 3 | TALANG ANAU | 672.421.387 | | 144.442.153 | 816.863.540 |

| NO | NAMA KECAMATAN/ NAGARI | Alokasi Dasar | Alokasi Afirmasi | Alokasi Formula | Pagu Dana Desa per-Nagari |
|---|---|---|---|---|---|
| **IX** | **Kecamatan Lareh Sago Halaban** | **5.379.371.096** | | **2.183.630.882** | **7.563.001.978** |
| 1 | LABUAH GUNUANG | 672.421.387 | | 272.241.272 | 944.662.659 |
| 2 | BATU PAYUANG | 672.421.387 | | 172.843.599 | 845.264.986 |
| 3 | AMPALU | 672.421.387 | | 390.071.710 | 1.062.493.097 |
| 4 | BUKIK SIKUMPA | 672.421.387 | | 130.287.857 | 802.709.244 |
| 5 | BALAI PANJANG | 672.421.387 | | 315.043.386 | 987.464.773 |
| 6 | HALABAN | 672.421.387 | | 345.830.658 | 1.018.252.045 |
| 7 | TANJUANG GADANG | 672.421.387 | | 213.357.428 | 885.778.815 |
| 8 | SITANANG | 672.421.387 | | 343.954.972 | 1.016.376.359 |
| **X** | **Kecamatan Situjuah Limo Nagari** | **3.362.106.935** | - | **1.307.169.620** | **4.669.276.555** |
| 1 | SITUJUAH BATUA | 672.421.387 | | 248.495.500 | 920.916.887 |
| 2 | SITUJUAH LADANG LAWEH | 672.421.387 | | 235.128.389 | 907.549.776 |
| 3 | TUNGKA | 672.421.387 | | 291.823.101 | 964.244.488 |
| 4 | SITUJUAH BANDA DALAM | 672.421.387 | | 246.905.850 | 919.327.237 |
| 5 | SITUJUAH GADANG | 672.421.387 | | 284.816.780 | 957.238.167 |
| **XI** | **Kecamatan Mungka** | **3.362.106.935** | - | **1.537.304.896** | **4.899.411.831** |
| 1 | JOPANG MANGANTI | 672.421.387 | | 130.247.583 | 802.668.970 |
| 2 | SIMPANG KAPUAK | 672.421.387 | | 516.695.325 | 1.189.116.712 |
| 3 | MUNGKA | 672.421.387 | | 236.954.530 | 909.375.917 |
| 4 | TALANG MAUR | 672.421.387 | | 370.021.093 | 1.042.442.480 |
| 5 | SUNGAI ANTUAN | 672.421.387 | | 283.386.365 | 955.807.752 |
| **XII** | **Kecamatan Bukik Barisan** | **3.362.106.935** | - | **1.531.818.985** | **4.893.925.920** |
| 1 | MAEK | 672.421.387 | | 503.616.621 | 1.176.038.008 |
| 2 | BANJA LOWEH | 672.421.387 | | 234.647.781 | 907.069.168 |
| 3 | BARUAH GUNUANG | 672.421.387 | | 297.742.976 | 970.164.363 |
| 4 | SUNGAI NANIANG | 672.421.387 | | 298.986.811 | 971.408.198 |
| 5 | KOTO TANGAH | 672.421.387 | | 196.824.796 | 869.246.183 |
| **XIII** | **Kecamatan Akabiluru** | **4.706.949.709** | - | **1.589.005.276** | **6.295.954.985** |
| 1 | SARIAK LAWEH | 672.421.387 | | 291.500.657 | 963.922.044 |
| 2 | KOTO TANGAH BATU AMPA | 672.421.387 | | 358.164.459 | 1.030.585.846 |
| 3 | BATUHAMPAR | 672.421.387 | | 141.883.009 | 814.304.396 |
| 4 | SUAYAN | 672.421.387 | | 394.297.371 | 1.066.718.758 |
| 5 | SUNGAI BALANTIAK | 672.421.387 | | 122.995.974 | 795.417.361 |
| 6 | PAUH SANGIK | 672.421.387 | | 135.290.982 | 807.712.369 |
| 7 | DURIAN GADANG | 672.421.387 | | 144.872.824 | 817.294.211 |
| | **Total** | **53.121.289.573** | **578.000** | **21.902.737.000** | **75.446.605.000** |

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 17 Januari 2019

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**IRFENDI ARBI**
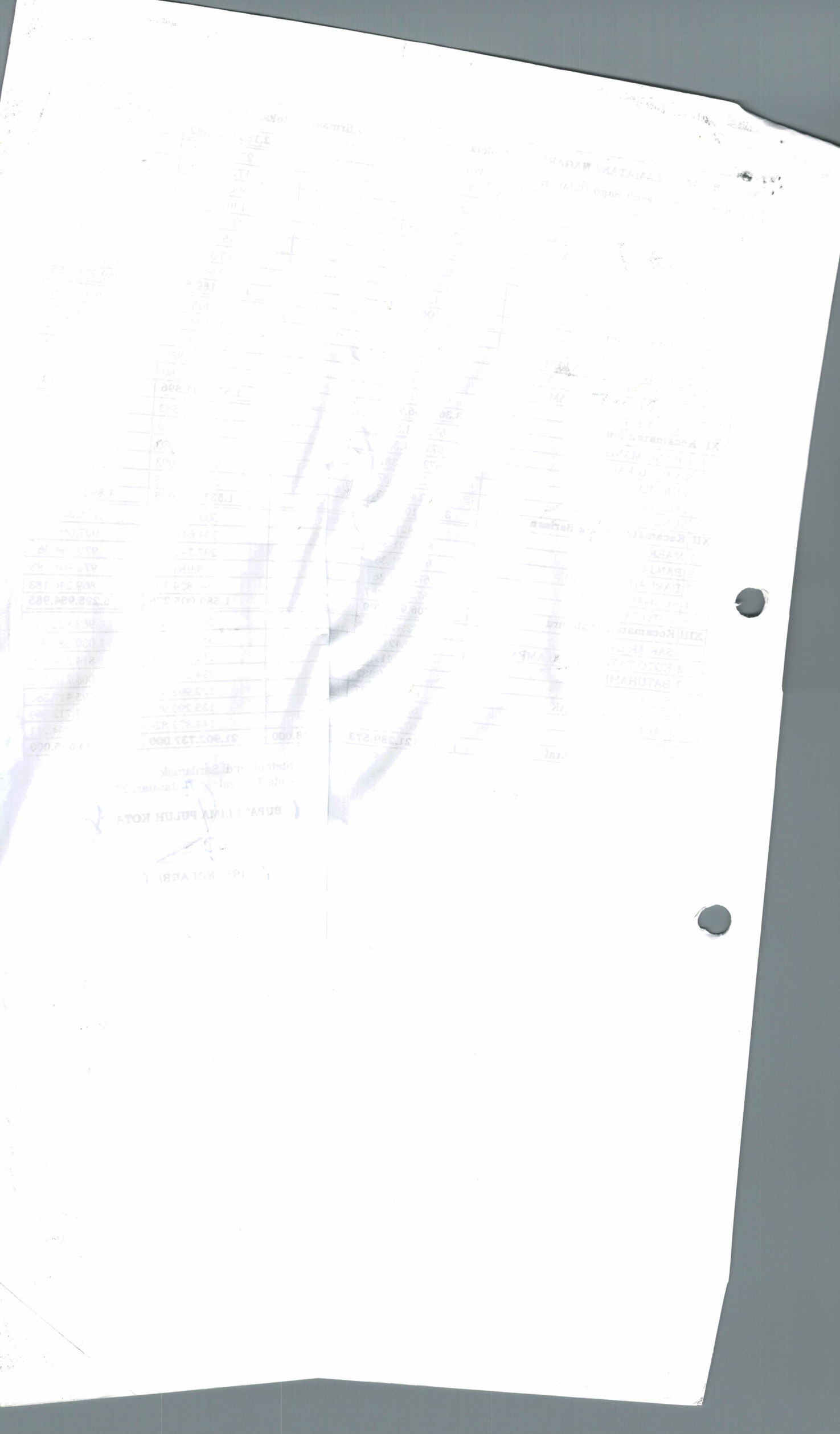
17/1/2019